

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas mengenai konstruksi identitas asylum seeker di negara transit, Indonesia. Penggagas berbagai penggambaran atas etnis Rohingya di beberapa media massa akan dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis. Objek yang akan diteliti ada pada wacana berita di media massa online yaitu BBC News Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena media massa di Indonesia juga mulai menuliskan berita terkait pengungsi Rohingya setelah tiba di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia pun mulai membentuk opini-opini dalam menanggapi berita tersebut. Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan bahwa pemberitaan dalam media massa tersebut menggambarkan bahwa Rohingya mengalami krisis identitas seperti pengakuan di masyarakat, hilangnya kewarganegaraan, dan hak-hak dasar atas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Para imigran ini tidak mendapatkan hak-haknya di Indonesia dikarenakan status mereka sebagai pencari suaka. Status yang kurang jelas ini membuat mereka belum dapat berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Di lain sisi, para etnis Rohingya ini juga tidak dianggap oleh pemerintah Myanmar sebagai warga negara mereka. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa terjadi beberapa perbedaan penulisan berita antara kedua media tersebut. Berdasarkan observasi tersebut, terdapat pertanyaan yang muncul di benak peneliti : “Bagaimana identitas etnis Rohingya sebagai asylum seeker dikonstruksikan dalam berita di BBC News Indonesia selama tahun 2020?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode analisis tekstual.

Menurut referensi, semenjak tahun 1937 ketika Myanmar lepas dari kolonialisme Inggris, tercipta sebuah Home Rule yang membuat pemerintahan mereka mampu meniadakan keberadaan umat islam atau etnis Rohingya hingga kini. Bentuk diskriminasi tersebut seperti penghapusan akses terhadap kesejahteraan, pendidikan, dan penyitaan seluruh properti termasuk kartu identitas.

Keadaan etnis Rohingya sebagai stateless ini juga menyebabkan mereka tidak memiliki hak apapun sebagai warga negara dan juga kesusahan untuk menjadi warga negara dimanapun, termasuk Indonesia (SUAKA, 2015).

Bukan pihak pemerintah saja yang melakukan pengasingan ini, masyarakat beragama Buddha menjajah orang-orang Rohingya, yang juga merupakan saudara mereka sendiri. Mereka tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya dan berusaha menghilangkan mereka dari Myanmar. Etnis Rohingya dipersekusi habis-habisan bahkan banyak terjadi aksi saling-balas, saling-serang, dan saling-bunuh yang menyebabkan Myanmar tenggelam dalam tragedi kemanusiaan memilukan. Pada kenyataannya, dari semenjak kemerdekaan Burma-Myanmar pada tahun 1948, setidaknya etnis ini juga melakukan beberapa perlawanan. Perlawanan yang dilakukan etnis Rohingya ini antara lain melakukan pemberontakan, migrasi, hingga penolakan identitas dengan disebut sebagai etnis Bengali (Mitzy, 2014).

Kini mayoritas Rohingya yang berada di Myanmar telah melakukan pencarian eksodus ke negara lain. Nahasnya, upaya tersebut terganjal sikap negara-negara tetangga yang bertindak seolah tak acuh akan mereka. Negara Thailand yang terletak bersebelahan dengan Myanmar seolah-olah menutup mata akan kejahatan para pelaku perdagangan manusia yang menjaring etnis Rohingya. Para pelaku ini dengan leluasa menyelundupkan mereka dengan dalih keselamatan. Ketika mereka sudah berada dalam kendali pelaku ini, mereka perlu membayar sejumlah uang untuk pergi secara bebas. Bagi mereka yang tidak mampu membayar tebusan tersebut, akan dijadikan budak pekerja atau ditinggal mati di kamp penampungan. Bahkan kuburan mereka yang tidak mampu membayar dapat ditemukan dengan mudah tersebar di Thailand bagian selatan. Bagi mereka yang melakukan pelarian menggunakan kapal ini pernah juga terdampar di perairan dekat provinsi Aceh. Perjalanan mereka ternyata awalnya ditolak oleh otoritas Malaysia agar mereka masuk ke negaranya, lalu dilanjutkan dengan pemerintahan Thailand. Meski boat people ini awalnya diselamatkan oleh nelayan setempat, otoritas Indonesia juga melakukan tindakan penolakan yang sama (Hasan, 2016). Hal itu disebabkan sebagai anggota ASEAN, Indonesia dan Myanmar memegang prinsip non-intervensi yang melarang negara anggota mencampuri urusan domestik anggota

ASEAN lain. Tujuannya adakah penyeimbang antara Blok Barat dan Blok Timur dalam Perang Dingin, serta jaminan keamanan, kedaulatan, dan kebebasan dalam berhubungan dengan negara tetangga (Firman, 2017).

Berdasarkan statistik UNHCR per September 2016, jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia adalah sebanyak 959 orang. 18 Jumlah ini terbagi dari 62 orang pencari suaka dan 897 orang yang sudah mendapat status pengungsi, dan terdiri dari 294 perempuan dan 665 laki-laki. Jumlah ini juga mencakup hingga 13% dari total populasi pencari suaka dan pengungsi Indonesia. Sementara puncak statistik tertinggi pernah mencapai 1.791 orang yaitu pada masa awal kedatangan gelombang besar pengungsi Rohingya pada Mei 2015. (Rachmah & Pestalozzi, 2016).

Kebanyakan dari mereka pun bukan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuannya, melainkan mereka terdampar dan terjebak di sini hingga ada negara ketiga yang mau menerima. Alasan terjebak di bukan negara tujuan ini adalah dasar penulis menggunakan konsep Indonesia sebagai negara transit. Dalam pemberitaan Tirta pun dijelaskan, bahwa para pengungsi Rohingya sebenarnya tidak berniat ke Indonesia. Negara-negara maju seperti Australia dan Amerika merupakan tujuan awal mereka. Sayangnya perjalanan menuju kesana kerap terkendala karena terdampar di perairan Indonesia. Para pencari suaka yang berada di selatan Indonesia kebanyakan bertujuan ke Australia. Alasannya karena pekerjaan di sana bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan jika di dalam negeri tidak bisa bersaing dengan pekerja Indonesia (Rahadian, 2018). Namun banyak masyarakat Indonesia yang keliru akan pencari suaka dengan pekerja migran. Masalah sosial kerap muncul akibat tak paham ihwal pengungsi ini. Bukannya berbelas kasih, para pengungsi yang dikira sebagai “pekerja migran” dianggap sebagai saingan mereka dalam urusan mencari pekerjaan (Dhani, 2017).

Menurut kisah salah satu Rohingya di Sidoarjo dalam IDN Times, kedatangan mereka ke Indonesia akibat karamnya kapal yang seharusnya menuju Australia namun terhenti di Timor Leste. Pihak otoritas Timor Leste pun mengirimkan mereka ke Indonesia dan dengan polisi setempat akhirnya dibawa ke

rudenim Makassar untuk pemberian status pengungsi lalu dipindahkan ke Sidoarjo (Folia, 2018).

Indonesia sendiri pun sebenarnya tidak berkewajiban menampung pengungsi, karena tidak meratifikasi konvensi 1951 terkait dengan keadaan pengungsi. Namun, pemerintah Indonesia memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (SUAKA, 2015). Sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, Indonesia juga tidak memberikan hak untuk bekerja dan memperoleh bantuan nasional bagi para pengungsi dan pencari suaka di negara ini. Namun, kebutuhan para kelompok ini juga telah disediakan lumayan lengkap seperti sandang, pangan, dan papan oleh pihak yang berwenang seperti International Organization for Migration (IOM). Untuk permasalahan hukum juga telah diatur oleh pihak UNHCR (Domloboy, 2017). UNHCR juga secara khusus bertanggung jawab untuk melakukan penentuan status pengungsi dan mengupayakan penempatan ke negara ketiga (resettlement) atau proses pengembalian ke negara asal (repatriasi).

Indonesia juga sudah menyediakan rumah susun detensi imigrasi (rudenim) bagi mereka untuk tinggal secara cuma-cuma. Namun kelengkapan fasilitas di rusun Taman itu justru memiliki larangan berat yang wajib diterapkan, yaitu dilarang menikah. Larangan ini tentu menciderai hak seseorang untuk beragama maupun berkeluarga. Namun jika pernikahan itu pun terjadi dapat menimbulkan problematika yang lebih rumit seperti kasus pernikahan laki-laki Rohingya dengan warga negara Indonesia (WNI) di Medan. Sang suami tidak dapat serumah dengan istrinya ketika malam dikarenakan harus kembali ke rudenimnya. Status kewarganegaraan suami tersebut dan si anak juga masih menjadi polemik (Muhardiansyah, 2017). Meskipun diakui secara agama, perkawinan mereka tidak pernah tercatat secara resmi dalam sistem pencatatan sipil atau agama yang berlaku. Masalah ini jelas berdampak negatif pada hak anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut seperti ketiadaan akte kelahiran.

Penempatan para migran ini juga telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dan terletak di berbagai daerah termasuk Jawa Timur. Keberadaan rusun di kawasan Jemundo, Taman ini juga sepertinya bukan diperuntukkan untuk para migran dan terkesan seadanya. Seperti informasi mengenai rudenim di Indonesia, rusun di Taman tidak termasuk dalam jajaran rudenim yang telah ada. Jika melihat asal muasal dibangunnya rusun ini, pembangunan rusun ini telah selesai semenjak tahun 2012 ketika masa jabatan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo. Operasional rusun yang prioritas peruntukannya adalah untuk pedagang pasar Puspa Agro. Dengan lokasi rusun yang dekat dengan pasar, diharapkan bisa menjadi tempat istirahat bagi pedagang pasar dari berbagai daerah di Jatim tersebut. Namun adanya rusun ini tak menutup kemungkinan juga bisa dihuni warga selain pedagang asalkan memenuhi persyaratan, seperti warga kurang mampu dan tak punya tempat tinggal tetap (KOMINFO Jatim, 2012).

Menurut Rakhman (2013:2), krisis identitas dapat terjadi karena manusia mendapat tekanan atau represi yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keraguan atas identitas yang dimilikinya. Krisis identitas ini tentu membawa dampak yang buruk bagi kaum Rohingya itu sendiri maupun warga lokal khususnya yang bertempat tinggal di sekitar rudenim Taman, Sidoarjo. Orang-orang asing selalu dianggap sebagai out-group, dipandang sebagai komunitas yang akan mengancam eksistensi in-group (Purwasito, 2003). Dampak negatif itu tercermin dari perilaku pengungsi yang telah terjadi, mulai dari yang ringan seperti pelanggaran jam malam diakibatkan sering keluyuran hingga kasus perampokan dan human trafficking. Seperti kasus dalam Antara, empat pengungsi asal etnis Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh tertangkap oleh Satpol PP setempat sedang mengisap ganja. Mereka terancam hukuman selama empat tahun kurungan penjara (Zulfirman, 2015). Kemudian ada juga kasus empat pengungsi perempuan Rohingya yang mengaku telah diperkosa. Namun, hasil visum yang dilakukan RSU Cut Meutia menunjukkan, keempat perempuan Rohingya itu tidak mengalami pemerkosaan. Akibat dari cerita bohong oleh warga Rohingya tersebut, dunia internasional menghujat Aceh dan Indonesia sebagai negara yang tidak memperlakukan mereka dengan baik. Pada kenyataannya relawan dan rakyat Aceh telah berbuat sebaik

mungkin untuk hidup mereka (Masriadi, 2015). Oknum-oknum seperti inilah yang dapat meresahkan warga setempat. Pandangan masyarakat akan beberapa individu dapat mengeneralisir keseluruhan etnis Rohingya dengan stigma buruk. Mereka yang melakukan tindakan tak terpuji ini dapat mencoreng identitas etnis Rohingya.

Identitas yang perlu ditelisik di sini sebenarnya tidak transparan layaknya membaca KTP dari seorang warga negara. Banyak pertimbangan yang perlu diketahui dari suatu kelompok agar dapat menentukan identitas mereka khususnya di kehidupan bermasyarakat. Stuart Hall menjelaskan (1989:222):

“Perhaps instead of thinking of identity as an already accomplished fact, which the new cultural practices then represent, we should think, instead, of identity as a 'production', which is never complete, always in process, and always constituted within, not outside, representation.”

Adanya Rohingya membawa nilai-nilai budaya dari tanah kelahirannya sendiri pun sepertinya tidak dapat merepresentasikan Myanmar itu sendiri. Lalu timbulah sebuah problematika akan siapakah sebenarnya Rohingya ini. Sebuah konsep identitas yang tidak jelas telah diemban etnis ini semenjak lahir dan berlaku di belahan bumi mana pun. Rohingya sendiri dapat diibaratkan sebagai ‘black people’ dalam Stuart Hall yaitu, sebuah identitas yang tidak stabil, baik menurut budaya maupun politiknya.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, peneliti berniat untuk mengkaji secara mendalam mengenai identitas yang dimiliki oleh para Rohingya sebagai pencari suaka khususnya yang sempat atau masih bertempat tinggal di Indonesia. Ketertarikan ini didasarkan pada krisis identitas para pencari suaka di Indonesia yang dikategorikan sebagai negara transit. Faktor seperti budaya, politik, dan kepercayaan juga dapat berpengaruh terhadap cara pengungsi ini beradaptasi dengan masyarakat lokal hingga menimbulkan proses pencarian jati dirinya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan berupa analisis tekstual yang berdasarkan wacana dari beberapa media.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengambil rumusan masalah yang akan digunakan adalah:

“Bagaimana identitas etnis Rohingya sebagai asylum seeker dikonstruksikan dalam berita di BBC News Indonesia selama tahun 2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana identitas etnis Rohingya sebagai asylum seeker dikonstruksikan dalam berita di BBC News Indonesia selama tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah mengembangkan lingkup kajian mengenai identitas migran khususnya etnis Rohingya maupun para asylum seeker.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah mampu bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber rujukan dan memberikan data maupun informasi atas hasil penelitian ini. Serta memberi pengetahuan baru bagi masyarakat atas kondisi para migran khususnya Rohingya yang berada di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teks Berita sebagai Wacana

Manusia merupakan makhluk yang berbahasa. Dengan adanya bahasa manusia mampu melakukan komunikasi. Dalam keseharian kemampuan dalam berbahasa ditentukan berdasarkan penggunaan makna, simbol, dan komunikasi (Alwasih, 2014:44). Bahasa mampu dijadikan alat komunikasi karena bahasa merupakan kombinasi kata yang diatur secara sistematis. Sehingga bahasa dapat

dianggap sebagai tanda yang mampu merepresentasikan kekuasaan, cara berpikir, dan sebagainya. Tidak hanya secara lisan, bahasa juga mampu didokumentasikan dalam bentuk tulisan yang biasa disebut sebagai bahasa tulisan. Salah satu contoh bahasa tulisan dapat ditemui dalam produksi media massa. Sehingga melalui bahasa sebuah peristiwa yang tidak dialami oleh pembaca dapat diketahui karena adanya berita. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bahasa tulisan mampu menimbulkan sebuah makna.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi bukan hanya proses penyampaian pesan, tetapi pertukaran simbol yang memiliki atau membentuk makna. Makna mampu timbul karena adanya interaksi dalam sebuah konteks tertentu melalui berbagai medium. Salah satu bentuk interaksi adalah melalui bahasa tulisan dalam media massa yang biasa dikenal sebagai berita. Pada dasarnya berita merupakan fakta yang dirangkai secara pribadi dalam institusi media. Namun, karena dipublikasikan melalui media massa, maka akan menimbulkan makna bagi orang lain. Dasarnya bahasa dalam berita dikonstruksikan dan mengkonstruksi maknanya tergantung orang yang membuat dan membacanya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Stuart Hall dalam Eriyanto (2001:37) bahwa makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi pada praktik pemaknaan.

Berita yang dilontarkan dan menjadi perbincangan khalayak dapat disebut sebagai wacana. Menurut Hamad (2010), wacana atau discourse dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discourse (dengan d kecil) dan Discourse. discourse (dengan d kecil) melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya. Sedangkan Discourse merangkai unsur discourse (dengan d kecil) bersama unsur non-linguistik untuk memerankan kegiatan, identitas, dan pandangan. Menurut Hamad (2010), dalam pembuatan wacana sendiri terdapat tiga (3) strategi yang digunakan, yaitu Signing, penggunaan tanda-tanda bahasa, baik verbal maupun non-verbal; Framing, pemilihan wacana berdasarkan pemihakan dalam berbagai aspek wacana; dan Priming, mengatur ruang atau waktu untuk mempublikasikan wacana di hadapan khalayak.

1.5.2 Teks Berita sebagai Media Konstruksi Identitas

Secara ideal, sistem dalam media seharusnya selaras dengan demokrasi, yaitu untuk membantu memberikan para pembacanya tempat bersuara (Miller, 1998). Namun, pada kenyataannya, media justru bekerja dengan cara-cara yang menonjolkan ketidakpedulian, kekejaman, dan kesinisan. Media juga tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Malahan, media memiliki pengaruh besar dalam membentuk konstruksi realitas (Gamson, 1992).

Konten yang dihasilkan oleh media digunakan untuk melakukan konstruksi realitas sosial dan politik. Dalam menerima konten-konten yang dihasilkan media, kita tidak mendapatkan informasi yang netral, melainkan dari sudut pandang orang-orang yang berkepentingan dalam bidang politik dan ekonomi. Media digunakan sebagai alat untuk membangun konstruksi realitas sosial secara tidak kentara.

Menurut Berger & Luckman (1991), realitas dibangun oleh manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab. Media merupakan salah satu agen untuk mengkonstruksi sebuah fenomena. Maka, ideologi pada media memiliki pengaruh yang besar untuk membentuk konstruksi realitas. Menurut Shoemaker and Reese (2013), ideologi adalah kondisi saat orang-orang mengikatkan diri kepada kepentingan kolektif untuk mengontrol kekuasaan. Secara tidak langsung, ideologi media dan jurnalis yang memproduksi konten mempengaruhi konstruksi realitas pembaca berita.

Menurut Downey et al (2014), ideologi memiliki beberapa ciri-ciri yaitu, memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi persetujuan, menyembunyikan hubungan sosial historis dari yang sebenarnya, serta bergantung pada partai tertentu. Media membawakan sebuah berita berdasarkan, utamanya ideologi dari media tersebut. Sehingga isi berita dari suatu media dapat menunjukkan ideologi dari pemimpin media.

Saat media membentuk apa yang dipikirkan audiensnya, maka media juga mempengaruhi logika seseorang dalam memandang sebuah fenomena (Entman, 2008). Pemegang kepentingan mengontrol konstruksi realitas karena mereka menginginkan masyarakat menyetujui ideologi yang mereka tunjukkan. Entman (2008) juga menyebutkan bahwa untuk mengubah perilaku orang-orang,

membutuhkan kekuasaan dengan melakukan framing untuk mempengaruhi orang-orang dalam berperilaku tertentu.

Framing atau pemingkaian merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana media membentuk apa yang dipikirkan oleh orang-orang (Eriyanto, 2002). Media tidak bisa memberikan pemahaman yang utuh atas sebuah fenomena karena keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki. Maka, dalam melakukan pemberitaan, jurnalis selalu menyeleksi fakta dalam penulisan berita. Dalam membuat sebuah berita, erat kaitannya dengan pengalaman serta kecenderungan psikologis yang dimiliki oleh jurnalis (Nugroho et al, 1999). Ideologi yang dimiliki jurnalis juga memainkan peran penting dalam membentuk sebuah berita.

Miller (1988) menyebutkan bahwa media menggunakan simbol-simbol untuk membentuk konstruksi realitas mengenai isu sosial dan politik. Kacamata yang digunakan dalam membingkai sebuah peristiwa tidak netral, dan dioperasikan oleh orang-orang dengan kekuatan tertentu. Menurut Gamson (1992), Framing dilihat sebagai sebuah storyline dari suatu narasi tertentu tentang sebuah fenomena. Menurut Gurevith & Levy (1985), media dilihat sebagai sebuah tempat dimana beragam grup sosial beradu untuk memenangkan ideologi golongannya dalam memenangkan konstruksi realitas.

Media dapat melakukan konstruksi realitas untuk membentuk persepsi tentang identitas. Menurut Baudrillard (1994), masyarakat postmodern sangat bergantung pada bentuk model dan peta, serta kehilangan kontak langsung dengan realita atau dunia nyata yang menjadi petunjuk untuk membuat sebuah model atau peta. Realitas dilihat dari sudut pandang model dan petunjuk, padahal realita lebih dahulu ada daripada petunjuk yang dibuat. Baudrillard (1994) menyebutkan petunjuk yang ada tidak merepresentasikan wilayah, bahkan dapat membahayakan wilayah, hal ini yang disebut dengan simulacra. Simulacra bukan tentang imitasi, duplikasi, maupun parodi. Melainkan, sebuah pertanyaan tentang lambang dan tanda sebenarnya yang merepresentasikan dunia nyata.

Baudrillard (1994) menyebutkan urutan simulacra, yang pertama di era pra-modern, yaitu citra adalah tiruan yang jelas dari suatu realita; gambar hanya diakui

sebagai ilusi dan penanda tempat nyata. Pada urutan simulacra kedua, berkaitan dengan revolusi industri di abad 19 yang mana menunjukkan perbedaan citra dan representasi telah dirusak oleh produksi massal dan proliferasi salinan. Produksi tersebut menutupi realitas yang mendasarinya dengan membuat bentuk tiruan yang sangat baik darinya sehingga dapat menggantikannya. Pada urutan ketiga, simulacra yang berhubungan dengan zaman postmodern, yaitu representasi mendahului dan menentukan realitas sehingga tidak ada pembeda antara realitas dengan representasinya, yang ada hanya simulacra. Selama ini, media membingkai realitas identitas suatu bangsa dengan menggunakan konsep simulacra, dimana orang-orang mengetahui identitas mereka dari media terlebih dahulu, sebelum menyaksikan langsung kenyataannya.

1.5.3 Identitas Rohingya sebagai Asylum Seeker

Identitas menurut KBBI adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri. Perbedaan ciri atau keadaan khusus inilah yang digunakan sebagai acuan hasil pemaknaan masyarakat atas suatu individu. Menurut Michael Hecht dalam Teori Komunikasi, identitas tergabung melalui tiga konteks budaya yaitu individu, komunal (kolektif), dan publik. Identitas merupakan penghubung utama antara individu dengan masyarakat juga komunikasi merupakan mata rantai yang memperbolehkan hubungan ini terjadi (Littlejohn & Foss, 2009).

Identitas juga terkait erat dengan identifikasi atas siapa diri anda dan karakteristik khusus yang membuat anda berbeda dari orang lain. Identitas juga tidak hanya mencakup siapa diri anda, tetapi juga kategori sosial yang anda identifikasi sendiri dan kategori yang diidentifikasi orang lain kepada anda (Alberts, Nakayama, & Martin, 2019, 46).

Identitas ini digunakan sebagai pembeda atas suatu struktur sosial maupun pola-pola perilaku sosial. Klasifikasi sosial memungkinkan individu untuk menemukan atau mendefinisikan dirinya di lingkungan sosial. Menurut SIT, konsep diri terdiri dari identitas pribadi yang mencakup karakteristik istimewa (Atribut tubuh, kemampuan, sifat psikologis, hobi) dan identitas sosial yang mencakup klasifikasi kelompok yang menonjol. Di dalam sifat identitas sosial sendiri terdapat

sebuah relasi melalui identifikasi dan perbandingan sosial. Seseorang dapat dikatakan sebagai perwakilan atau ambil status atas suatu keberhasilan kelompok. Keberhasilan itu juga mempengaruhi bagaimana kita melihat anggota dari kelompok sosial itu, baik keberhasilan itu berdampak positif atau negatif (Ashforth & Mael, 1989).

Menurut Stets & Burke, proses identifikasi dan perbandingan sosial ini juga menimbulkan konsekuensi tersendiri. Konsekuensi dari kategorisasi diri (identifikasi) adalah kesamaan yang dirasakan antara diri dengan sesama anggota kelompok (in-group), maupun perbedaan antara anggota diri dengan kelompok luar (out-group). Akibat yang timbul atas proses ini adalah sikap, kepercayaan, nilai, norma perilaku, gaya bicara, dan sifat lain yang diyakini berhubungan dengan kelompok-kelompok yang hampir sama. Sedangkan konsekuensi dari perbandingan sosial adalah dimensi yang akan menguatkan hasil dari diri kita sendiri. Implikasinya adalah seperti peningkatan harga diri dari seseorang atas bagaimana dia menganggap bahwa in-group miliknya lebih positif dibandingkan out-group (Stets & Burke, 1998).

Keberadaan Rohingya juga dipandang berbeda-beda menurut kelompok lain. Diibaratkan oleh pemerintah Myanmar tak lain bagaikan hama di perkebunan yang perlu dibasmi. Adanya Rohingya sama sekali tidak dianggap dan ingin segera lenyap dari Myanmar. Bagi umat muslim di Indonesia, etnis Rohingya dianggap sebagai saudara karena kesamaan agama. Di mata PBB, Rohingya adalah etnis yang paling tertindas dalam sepanjang sejarah. Sedangkan di negara ketiga seperti Australia, mereka hanyalah imigran gelap, boat people, atau asylum seekers yang berencana menetap di negaranya. Di Uni Eropa, orang-orang disana memiliki sentimen seperti kebencian rasial, islamofobia, dan xenofobia terhadap para pengungsi Rohingya.

Kategori sosial dimana seseorang menempatkan dirinya, merupakan bagian dari masyarakat yang sudah terstruktur dan berkaitan dengan perbedaan kategori. Di dalam setiap kategori ini memiliki nilai-nilai yang berbeda seperti kekuasaan, nilai prestis, status, dan sebagainya (Hogg & Abrams, 1998). Kombinasi dari kategori-kategori sosial inilah yang juga akan membentuk identitas dari seseorang.

Dijelaskan oleh Stuart Hall, bahwa perbedaan yang ada ini menyatakan setiap identitas ditempatkan, diposisikan, dalam budaya, bahasa, sejarah yang sudah ada. Identitas menjadi dibentuk dan ditransformasikan secara terus menerus sehubungan dengan cara-cara di mana kita diwakili atau ditangani dalam sistem budaya yang mengelilingi kita (Appignanesi, 1987). Bahwa ketika berada di masyarakat, identitas individu sebagian besar berasal dari kategori sosial yang telah menjadi milik individu itu sendiri.

Jika melihat Rohingya sendiri, identifikasi mereka lebih mengarah kepada sebuah etnis. Etnis Rohingya adalah salah satu dari total 135 etnis minoritas yang berada di Burma-Myanmar. Dari berbagai etnis di sana, menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) etnis Rohingya dianggap etnis yang paling teraniaya (*most persecuted ethnic*) (Mitzy, 2014). Menurut Frederick Barth dalam *Social Identity*, etnis dapat disebut ada ketika ada yang mengklaim identitas etnis tersebut untuk diri mereka sendiri dan didefinisikan oleh orang lain sebagai pemilik identitas tersebut. Etnisitas selalu melibatkan komunikasi dua arah, antara ‘mereka’ dan ‘kita’. Tidak cukup dengan mengklaim identitas etnis saja, seseorang harus mampu menunjukkannya dengan memuaskan, untuk mengaktualisasikannya. Cara seseorang menunjukkan bahwa dia adalah salah satu anggota dari kelompok tersebut, dapat dilihat melalui tindakan individunya, seperti penggunaan bahasa sehubungan dengan identitas etnisnya (Jenkins, 2008).

Ketika individu mengakui identifikasi sebagai anggota etnis tersebut, akan timbul sebuah pengembangan yang membentuk kerangka identitas kolektif. Di dalam identifikasi secara kolektif juga terdapat batasan-batasan (*boundaries*) yang membedakan antara kelompok satu dengan yang lain. Namun dijelaskan oleh Barth (Jenkins, 2008):

“Even where it can be said to exist, it’s far from clear ‘where’ or ‘what’ the boundary of any particular identity ‘is’. This is not surprising, since ‘it’ is not, really, anywhere or anything.

Boundaries are to be found in interaction between people who identify themselves collectively in different ways.”

Batasan-batasan yang membedakan antara kolektif ini memang masih kurang jelas, namun batasan ini hanyalah permasalahan bagaimana membedakan antara 'kita' dan 'mereka'.

Asylum Seeker sendiri berawal dari kata Asylum yang bermakna Suaka yaitu '[a] tempat perlindungan dan hak negara untuk memberikan perlindungan dalam menjalankan kekuasaannya atas wilayah dan mengenai penerimaan dan pemindahan warga negara asing', dan memiliki efek yang memungkinkan warga negara asing tetap tinggal di tuan rumah negara (Cane & Conaghan, 2008). Definisi menyeluruhnya adalah seseorang yang melakukan transit dan sedang mengajukan permohonan untuk sebuah tempat perlindungan selain di tanah kelahirannya. Ia adalah migran yang sedang mencari kehidupan yang lebih baik dan berencana menjadi imigran (Whittaker, 2006).

Perbedaan Asylum Seeker dengan Refugees sendiri adalah dari status legalitasnya telah diakui atau tidak. Sementara 'pencari suaka' didefinisikan sebagai seseorang yang ingin mendapatkan suaka, dan biasanya seseorang yang mengajukan permohonan suaka melalui proses formal. Oleh karena itu, 'pencari suaka' adalah seseorang yang 'mencari' sesuatu, yang status hukumnya masih tertunda dan klaim suaka belum diterima atau ditolak oleh pihak berwenang di negara tuan rumah (negara ketiga). Seorang 'pengungsi' berbeda dalam arti bahwa dia adalah individu yang situasinya telah dinilai. Oleh karena itu, dia seharusnya seorang individu dengan situasi hidup yang lebih mapan di suatu negara baru, secara sementara atau permanen, selain di negara asalnya (d'Orsi, 2016).

Mayoritas Rohingya yang datang ke Indonesia masih berstatus asylum seeker, dikarenakan perpindahan mereka yang belum melalui proses administrasi yang formal atau dapat disebut sebagai illegal migration. Biasanya ketika mereka sampai di negara transit, mereka baru mengurus dokumen itu untuk mengubah status mereka yang sebelumnya hanya asylum seeker tanpa dokumen menjadi refugees yang masih berada di negara transit. Proses ini dibantu oleh UNHCR sebagai lembaga yang menaungi para pengungsi di seluruh dunia. Untuk prosesnya sendiri bisa memakan waktu satu

tahun di Indonesia. Sedangkan proses pemindahan ke negara ketiga bisa memakan waktu yang entah sampai kapan hingga negara tujuannya menyetujui pemindahan mereka.

Namun ketika seseorang berstatus sebagai asylum seekers atau refugees, di kemudian hari status itu bisa dihilangkan. Penghapusan status ini dinamakan cessation oleh UNHCR. Cara-cara penghapusan status ini dilalui seperti:

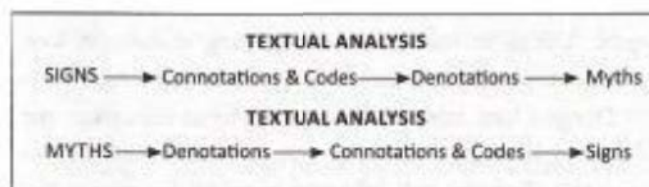
- a. Akuisisi kewarganegaraan baru.
- b. Perolehan kembali kewarganegaraan yang lama.
- c. Pemulangan sukarela (prematur atau tidak).
- d. Diterima secara khusus dan dimasukkan dalam daftar pemilih yang demokratis di negara asalnya.

Dalam proses penghapusan ini bisa menimbulkan risiko dan asumsi. Jika suatu negara yang menerima resettlement atau repatriasi bersedia menyerap kembali mereka, orang-orang ini tentu membutuhkan perumahan, transportasi, dan pekerjaan baru. Lalu akan timbul kedengkian dari penduduk asli negara itu yang sekiranya masih belum berkecukupan hidupnya. Dalam arti tertentu, menutup jalan para pencari suaka ini adalah solusi bagi mereka semua yang sudah tinggal di negara tersebut. Penghentian status pengungsi ini seharusnya tidak hanya membersihkan seorang individu dari ketergantungan, tetapi juga membersihkan seluruh kelompok, di mana negara asal mereka sekarang dapat dianggap sepenuhnya terbebas dari penindasan dan persekusi (Whittaker, 2006).

Bangladesh sebagai negara terdekat dari Myanmar telah berusaha menampung para pencari suaka tersebut secara sementara. Kedua pemerintahan dari negara ini pun telah melakukan perjanjian repatriasi di November 2017, namun sejauh ini hampir tidak ada Rohingya yang secara sukarela kembali karena takut akan dipersekusi kembali. Selain itu para agensi internasional yang sukarela membantu Rohingya di Cox Bazaar juga tidak ingin mereka kembali dengan alasan yang sama (Agence France-Presse, 2019).

1.5.4 Analisis Tekstual

Analisis tekstual merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memaknai atau menganalisis sebuah makna dalam teks. Menurut McKee (2003) dalam Ida (2004:64), analisis tekstual merupakan sebuah metodologi : suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis informasi dalam riset akademik. Analisis tekstual juga dapat didefinisikan sebagai interpretasi-interpretasi yang dihasilkan dalam sebuah teks. Menurut Ida (2004:66-67), analisis tekstual digunakan untuk menggali lebih dalam, membuka makna tersembunyi, membongkar konsep-konsep maupun ideologi, memahami bagaimana sebuah kultur, mitos, dan lainnya ada dalam proses produksi teks. Tidak hanya memaknai sebuah teks, metode ini juga harus menghubungkan dan membuat tali-tali hubungan antara kultur, politik, mitos, dan lain-lain yang ada dalam masyarakat dan budaya yang berlaku dengan teks-teks yang dihasilkan.



Gambar 1.1 Logika Analisis Tekstual dan Produksi Tekstual (Thwaites et al, 1994 dalam Ida, 2004)

Gambar 1.1 memperlihatkan logika peneliti analisis teks media. Berdasarkan gambar tersebut penelitian dimulai dengan menginterpretasi tanda-tanda yang diproduksi dalam sebuah teks media. Kemudian tanda-tanda ini akan diinterpretasi dengan makna-makna konotasi dan kode-kode yang konotasi, sehingga tanda-tanda tersebut dapat “dibaca”. Selanjutnya, makna konotasi ini akan menjadi makna denotasi jika argumen peneliti dan argumentasi diterima oleh khalayak sebagai sesuatu yang realitas yang pada akhirnya menjadi mitos dalam masyarakat.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penggunaan kualitatif sendiri bertujuan untuk mengetahui fenomena atas pengalaman yang dilalui oleh subjek penelitian, yang berupa persepsi, perilaku, dan motivasi dalam bentuk kata-kata atau bahasa (Moleong, 2008). Pada penelitian ini menggunakan metode analisis wacana. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memperoleh keakraban dengan suatu fenomena atau untuk mencapai wawasan baru ke dalamnya (Kothari, 2014). Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data serta informasi mengenai pemberitaan yang dilakukan media atas etnis Rohingya. Kemudian memberikan penggambaran identitas menurut pemaparan individu Rohingya itu sendiri berdasarkan hasil wawancara reportase tersebut.

1.6.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah wacana konstruksi identitas etnis Rohingya sebagai asylum seeker dalam berita di media massa online BBC News Indonesia.

1.6.3 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 teks berita yang berhubungan dengan etnis Rohingya di media massa online, yaitu BBC News Indonesia. Data yang akan ditelusuri adalah hasil jurnalistik dalam bentuk tulisan dan foto individu maupun kolektif Rohingya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Cara-cara yang dapat digunakan peneliti adalah:

a) Data Primer

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif melalui cara melihat dan menganalisis suatu media tertulis yang dibuat langsung oleh subjek

yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010). Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berupa dokumen sudah ada. Dokumen yang diperoleh dapat berupa dokumen tertulis, gambar, dan karya elektronik. Diharapkan dari hasil informasi jurnalis yang telah dikeluarkan media massa, serta kutipan pernyataan secara

langsung dengan subjek secara tepat akan memberikan jawaban atas rumusan masalah secara faktual.

b) Data Sekunder

a. Studi Pustaka dan Internet

Pengumpulan data berdasarkan dari buku, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber dari referensi ini dapat berupa bentuk fisik maupun diperoleh berdasarkan internet. Data sekunder ini diupayakan sebagai rujukan landasan teori atas permasalahan penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Dalam Miles dan Huberman (1994), dijelaskan terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berupa bentuk analisis yang menajamkan, mengkategorisasi, memusatkan, dan membuang hal yang tidak diperlukan atas data-data mentah yang didapat selama penelitian. Cara melakukannya dengan seleksi data, membuat ringkasan, dan menggolongkannya ke pola yang lebih luas. Penyajian data berupa kegiatan mengumpulkan informasi yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Penyajian data dapat berupa teks naratif. Lalu penarikan kesimpulan merupakan tinjauan kembali atas penelitian yang dilakukan mulai dari awal pengerjaan hingga akhir. Kesimpulan ini diharapkan memberikan salinan suatu temuan dalam bentuk alternatif data yang lebih ringkas.

Data yang akan dianalisis berupa berita-berita yang dihasilkan oleh media online di Indonesia tentang identitas Rohingya. Peneliti akan melihat bagaimana identitas Rohingya digambarkan dengan mengambil sampel dari BBC News Indonesia.

